

## **LAPORAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2019**

Nama : Lisa Aflaha, SH  
NIP : 19851203 201001 2 015  
Pangkat / Gol : Penata / III.c  
Jabatan : Kasubbid Pendataan dan Penetapan PAD  
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Triwulan : III Tahun 2019

---

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Uraian Tugas dan Fungsi**

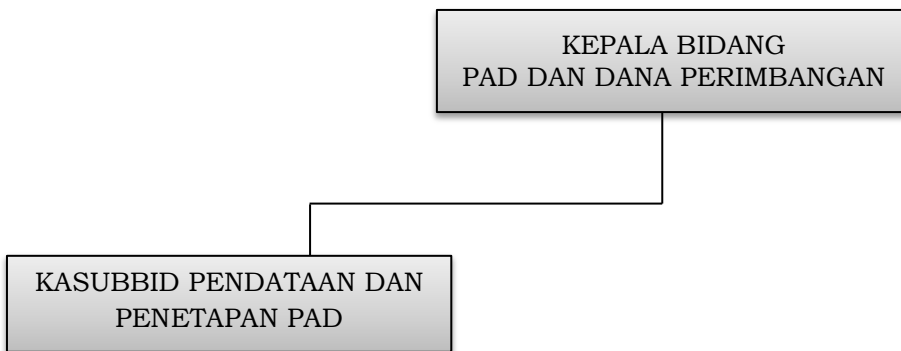
Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tugas Kasubbid Pendataan dan Penetapan PAD Bidang PAD dan Dana Perimbangan Badan Keuangan Daerah adalah menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, pengelolaan dan evaluasi pendataan dan penetapan Pendapatan Asli Daerah

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kasubbid Pendataan dan Penetapan PAD Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. melaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
- c. Melakukan pemeliharaan basis data Pendapatan Asli Daerah
- d. melakukan peninjauan lapangan atas obyek yang mempunyai potensi terhadap penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Melakukan legalisasi (perforasi) terhadap benda-benda berharga dan pengesahan lainnya;

- f. melaksanakan penyusunan dasar hukum tentang pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
- g. menyusun rencana penerimaan/target pendapatan daerah berdasarkan potensi yang ada.
- h. membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Ketetapan Kurang Bayar dan/atau Lebih Bayar atas Pajak dan Retribusi Daerah;
- i. memproses penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sesuai bidang tugas.

B. Struktur Jabatan (peta jabatan)



Kasubbid Pendataan dan Penetapan PAD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dengan.

## **BAB II**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Definisi lain menurut Tim Study Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP, akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan kinerja menurut Sri Ningsih (2002) kinerja mungkin berfokus pada input, misalnya uang, staf/karyawan, wewenang yang legal, dukungan politik atau birokratis. Kinerja mungkin juga berfokus pada aktivitas atau proses yang mengubah input menjadi output dan kemudian menjadi outcome, misalnya : kesesuaian program atau aktivitas dengan hukum, peraturan, dan pedoman yang berlaku atau standar proses yang ditetapkan. Kinerja mungkin juga berfokus pada jumlah output suatu program atau kegiatan, misalnya jumlah produk atau jasa yang telah diberikan atau disediakan bagi kolega, klien dan publik atau masyarakat

Khusus dalam laporan ini yang dibahas adalah akuntabilitas kinerja individu yang menggambarkan kinerja jabatan Kasubbid Pendataan dan Penetapan PAD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada triwulan III Tahun 2019 yang terdiri dari perjanjian kinerja, capaian kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja yang akan diuraikan dihalaman berikut ini



## KINERJA JABATAN

### A. PERJANJIAN KINERJA : Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Menyusun RKA	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	1			
2	Menyusun target Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dokumen target Pendapatan Asli Daerah	Dokumen	1			
3	Mengolah data potensi pajak dan retribusi daerah	Jumlah dokumen data potensi pajak dan retribusi daerah	Dokumen	1			
4	Rekonsiliasi realisasi penggunaan karcis	Jumlah SKPD yang mengikuti rekon	SKPD	1			
5	Membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)	Jumlah objek SKPD, SKRD, SKPDKB, SKPDKBT	Objek	480			

B. Capaian Kinerja 2019

Triwulan : III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
1	Tersusunnya RKA	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	1	1	100					
2	Tersusunnya target Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dokumen target Pendapatan Asli Daerah	Dokumen	1	1	100					
3	Tersedianya data potensi pajak dan retribusi daerah	Jumlah dokumen data potensi pajak dan retribusi daerah	Dokumen	1	1	100					
4.	Terlaksananya Rekonsiliasi realisasi penggunaan karcis	Jumlah SKPD yang mengikuti rekon	SKPD	1	1	100					
5	Tersedianya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)	Jumlah objek SKPD, SKRD, SKPDKB, SKPDKBT	Objek	480	480	100					
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2019</b>						<b>100</b>					

### C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Metode penyimpulan capaian kinerja sbb:

No	Capaian	Interprestasi
1	>100%	Melebihi Target
2	= 100%	Mencapai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Berdasarkan tabel capaian kinerja Triwulan III 2019 di atas rata-rata capaian kinerja Kasubbid Pendataan dan Penetapan PAD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari 5 (lima) Sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran dapat mencapai 100% atau sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran : Tersusunnya RKA, capaian kinerja 100%.  
Indikator Kinerja :
  - Jumlah dokumen RKA, tercapai 100%
2. Sasaran : Tersusunnya target Pendapatan Asli Daerah, capaian kinerja 100%  
Indikator Kinerja:
  - Jumlah dokumen target Pendapatan Asli Daerah yang disusun tercapai (100%)
3. Sasaran : Tersedianya data potensi pajak dan retribusi daerah, capaian kinerja 100%  
Indikator kinerja :
  - Jumlah dokumen data potensi pajak dan retribusi daerah, tercapai (100 %)
4. Sasaran : Terlaksananya Rekonsiliasi realisasi penggunaan karcis, capaian kinerja 100%.  
Indikator Kinerja :
  - Jumlah SKPD yang mengikuti rekon, tercapai (100%)

5. Sasaran : Tersedianya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), capaian kinerja 100%

Indikator Kinerja :

- Jumlah objek SKPD, SKRD, SKPDKB, SKPDKBT, tercapai (100%)

#### D. Rencana Tindaklanjut

Semua sasaran kinerja Kasubbid Pendataan dan Penetapan PAD Badan Keuangan Daerah Triwulan III tahun 2019 dapat tercapai (100%) hal ini mungkin karena adanya kerjasama dan koordiansi yang baik antar Kasubbid dan Staf Bidang PAD dan Dana Perimbangan serta bidang-bidang lain yang ada di lingkungan Badan Keuangan Daerah. Koordinasi dan kerjasama yang baik ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk pencapaian sasaran organisasi Badan Keuangan secara keseluruhan.



E. . Tanggapan Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain..... (ditulis tangan bila ada)

Jumlah dan nama pilihan disposisi dapat diisi sesuai kebutuhan yang diperlukan dengan mencentang (√).

### **BAB III PENUTUP**

#### A. Kesimpulan :

Pada Triwulan III tahun 2019 rata-rata capaian kinerja sasaran Kasubbid Pendataan dan Penetapan PAD Badan Keuangan Daerah tercapai 100% (sesuai target) yang telah ditetapkan.

#### B. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, antara lain:

1. Budaya kerja dan disiplin dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya belum berjalan maksimal.

#### C. Saran/masukan

1. Mendorong agar budaya kerja disiplin dan tanggung jawab lebih ditingkatkan guna mencapai hasil yang diharapkan.
2. Pembelakuan e-kinerja dapat dijadikan alat memotoring kinerja bawahannya.

Kandangan, 30 September 2019

Mengetahui :

Atasan Langsung  
Kabid PAD dan Dana Perimbangan,



**H. Fajar Abdi, ST**

Pembina

NIP. 19760611 200003 1 004

Kasubbid Pendataan dan  
Penetapan PAD,



**Lisa Aflaha, SH**

Penata

NIP. 19851203 201001 2 015



# **LAPORAN KINERJA INDIVIDU**

## **TRIWULAN III TAHUN 2019**

**NAMA : LISA AFLAHA, SH**

**NIP. 19851203 201001 2 015**

**JABATAN :**

**KASUBBID PENDATAAN DAN PENETAPAN PAD**

**BADAN KEUANGAN DAERAH**